LKjIP
TAHUN 2021

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id
Website : https://diskopukm.kukarkab.go.id
Kode Pos : 75512

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2021, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang *(performance improvement)*. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016 – 2021 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2021 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, Februari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Drs. Tajuddin
Pembina Utama Muda
Nip. 19640405 198603 1 036

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 2

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis 3

1.5 Uraian Singkat Organisasi 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

2.1 Perencanaan Strategis 8

2.2 Perjanjian Kinerja 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15

3.1 Capaian Kinerja 17

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021 30

BAB IV PENUTUP 42

4.1 Kesimpulan 42

4.2 Perbaikan Kedepan 42

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepeda Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengahmenyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu disusun strategi yang tepat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada. Dengan demikian maka seluruh faktor akan ditempatkan dalam suatu kerangka yang saling terkait satu sama lain.

Permasalahan yang dihadapi kedepan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

a. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP.
b. Masih rendahnya pemahaman pengelola KSP/USP – Koperasi dalam mengelola kegiatan koperasi.
c. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UMKM.
d. Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM.
e. Masih adanya koperasi yang tidak aktif (beku).
f. Rendahnya ketrampilan manajemen pengurus koperasi.
g. Rendahnya ketrampilan pengawas dalam bidang pengawasan.
h. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga.
i. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan.
j. Rendahnya kualitas SDM, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi.
k. Rendahnya ketersediaan skim permodalan secara khusus bagi KUMKM.
l. Rendahnya pemahaman kelompok masyarakat dalam membentuk lembaga Keuangan Mikro (LKM).
m. Kurang berfungsinya Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kukar.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

1. Kepala Dinas:
2. Sekretaris terdiri dari :
    1) Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian;
    2) Sub Bagian Penyusunan Program & Keuangan;
3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi :
    1) Seksi Organisasi
    2) Seksi Tatalaksana dan Keanggotaan
    3) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan;
4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi:
    1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
    2) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Koperasi';
    3) Seksi Permodalan dan SImpan Pinjam;
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri dari :
    1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
    2) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro;
    3) Seksi Kewirausahaan;

6. Kelompok Jabatan Fungsional

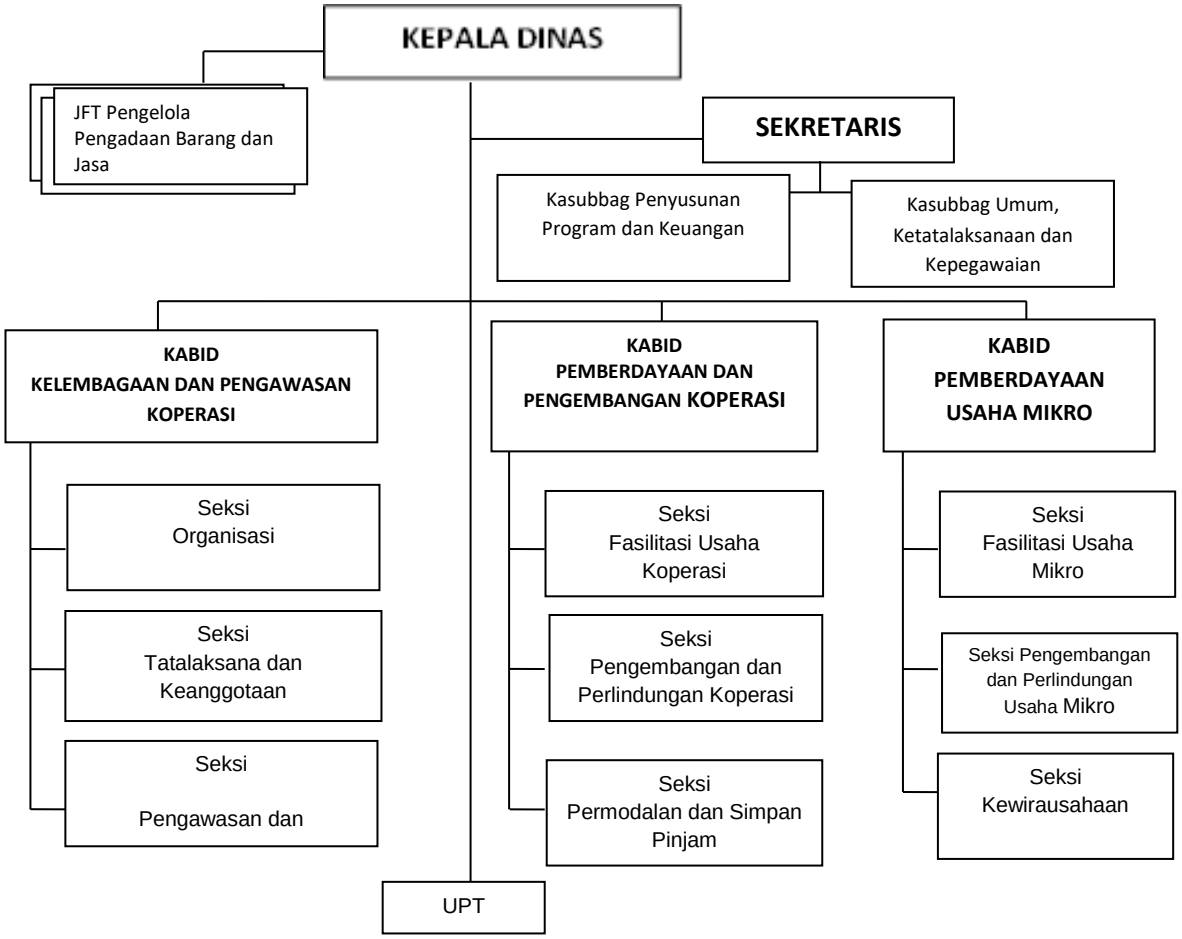

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Perbup Nomor 5 Tahun 2019)

Kekuatan sumber daya manusia Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah berjumlah 111 orang untuk ASN 76 orang dengan perincian Pejabat Struktural 16 orang, Staf 60 orang, dan Non ASN/THL 35 orang yang terdiri dari :

Laki –laki : 55 orang
Perempuan : 52 orang
Total Asn/Non Asn : 107 orang

Jumlah Pejabat Struktural

- Esselon II/b : 1 orang
- Esselon III/a : 1 orang
- Esselon III/b : 2 orang
- Esselon IV/a : 11 orang

15 orang

Tabel 1.1
Komposisi SDM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Status Kepegawaian	BIDANG					
		Sekretariat	**Kelembagaan & Pengawasan Koperasi**	**Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi**	**Pemberdayaan Usaha Mikro**	**JFT**	**Jumlah**
1	2	3	4	5	6	7	8
	ASN	23	17	16	16	0	72
	THL	16	15	2	2	0	35
Jumlah Perbidang ASN		39	32	18	18	0	107

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)																JUMLAH PNS
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Golongan I				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	S-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
2	S-2	4	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**9**
3	S-1	1	-	-	-	-	3	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	**26**
4	Diploma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
5	SD/SLTP/SLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	17	17	-	-	-	-	**37**
Jumlah		**5**	**2**	**1**	**0**	**0**	**3**	**7**	**17**	**1**	**2**	**17**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No	Data	Pegawai Negeri Sipil (PNS)																JUMLAH PNS
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Golongan I				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	PNS	5	2	1	0	0	3	7	17	1	2	17	17	0	0	0	0	72
		8				**27**				**37**				**0**				**72 Orang**

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.4
Data Pejabat Struktural yang Memenuhi
Persyaratan Diklat PIM

NO	KUALIFIKASI DIKLAT PIM	ESSELON				JUMLAH
		II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Sudah Diklat PIM	1	1	2	8	12
2	Lulus Tes	-	-	-	-	0
3	Belum Tes	-	-	-	3	3
	JUMLAH	**1**	**1**	**2**	**11**	**16 Orang**

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat uraian mengenai rencana strategis (Renstra), kebijakan dan program, rencana kegiatan tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk mengukur kinerja maka Iindikator Kineja Utama diambil dari RPJMD Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pada bagian akhir akan disajikan Perjanjian Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2021.

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah

Dinas Koperasi dan UKM salah satu Perangkat Daerah yang menjalankan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dimana Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021 adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN"

Visi diatas diarahkan dapat diuraikan sebagai berikut :

MAJU : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

MANDIRI : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

SEJAHTERA : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.

BERKEADILAN: Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan lima tahun mendatang, yaitu **Maju, Mandiri, Sejahtera, Berkeadilan.**

Upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021, maka Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalampembangunan serta penguatan perlindungan anak.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaah terhadap visi dan misi Kepala Daerah Kabiupaten Kutai Kartanegara dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat diuraikan Tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

1. **Tujuan Pertama : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan**
2. **Tujuan Kedua : Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan.**
3. **Tujuan Ketiga : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat.**

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	**Tujuan**		**Sasaran**	
	Uraian	**Indikator Kinerja**	**Uraian**	**Indikator Kinerja**
M1 : Memantafkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat.	**Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan**	**Indek Reformasi Birokrasi**	**Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**
M2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten.	**Meningkatnya pengentasan kemiskinan**	**IPM**	**Meningkatnya UMKM Wirausaha Baru**	**Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru**
M 4 : Meningkatkan Pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah	**Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat**	**LPE**	**Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**Persentase Koperasi Aktif**
			Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	**Persentase UMKM yang Naik Kelas**

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabuoaten Kutai Kartanegara untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Pertama " Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi ", dengan arah Kebijakan :
   a. Penerapan dan pemantapan reformasi birokrasi
   b. Peningkatan Kompetensi SDM aparatur
   c. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
   d. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas penggunaan anggaran
   e. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal
2. Strategi Kedua "Percepatan Pengentasan Kemiskinan ", dengan arah kebijakan :
   a. Pemantapan Penanggulangan Kemiskinan.
3. Strategi Ketiga " Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah ", dengan Arah Kebijakan :
   a. Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Koperasi dan UMKM.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	**Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi**	**Penerapan dan pemantapan reformasi birokrasi**
		Peningkatan kompetensi SDM Aparatur
		Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan daerah
		Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal

2	**Percepatan pengentasan kemiskinan**	**Pemantapan penanggulangan kemiskinan**
3	**Peningkatan daya saing sektor unggulan daerah**	**Peningkatan kapasitas dan pengelolaan Koperasi dan UMKM**

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran trategis pada tahun 2021, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya transpar ansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Wirausaha Baru	**Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru**	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	**Persentase Koperasi Aktif**	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM.
Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	**Persentase UMKM yang Naik Kelas**	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi Usaha Kecil Menengah.

Terdapat perbedaan nama Program sebagaimana Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara hal ini dikarenakan adanya Pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	Keterangan / Rumus Penghitungan
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Predikat Akuntabilitas Kinerja INstansi Pemerintah	Nilai	86,86	Hasil Penilaian SAKIP
		Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	Temuan Yang ditindak lanjuti tepat waktu
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	1	
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	Hasil dari Pengisian pada Aplikasi LHKPN Tepat Waktu
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	Hasil dari Pengisian pada Aplikasi LHKSN yang tepat Waktu

		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100	Hasil Penilaian
2	Meningkatnya Wirausaha Baru	Pertumbuhan UMKM Wirauasaha Baru	Orang	500	Pertumbuhan Pelaku UMKM
3	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Persen	81,53	Jumlah Koperasi Aktif dibagi dengan Jumlah Koperasi Seluruhnya dikali 100%
4	Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Persen	3,60	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas dibagi dengan Jumlah Usaha Mirko Seluruhnya dikali 100%

Dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2021 telah membuat Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2016-2021 sebagaimana **terdapat pada *lampiran 1*.**

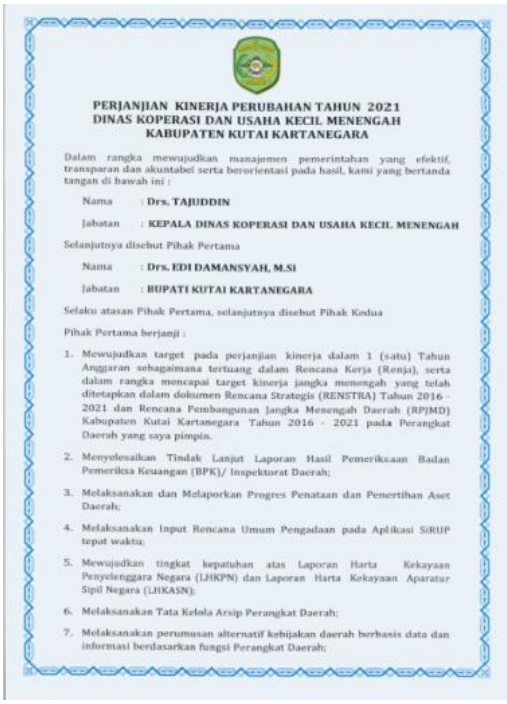

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. TAJUDDIN**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP tepat waktu;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi berdasarkan fungsi Perangkat Daerah;

8. Merencanakan, menganggarkan, melaksanakan Program dan Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
9. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Monitoring (Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah);
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2021

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

DRS. TAJUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640405 198603 1 036

Tabel
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dengan Data Awal Tahun 2016 dan Target Tahun 2021

NO	INDIKATOR SASARAN	Satuan	DATA AWAL 2016	TARGET 2021	TARGET AKHIR RESNTRA 2021
1.	Persentase Koperasi Aktif	%	77	81,53	81,53
2.	Presentase UMK Naik Kelas	%	2,33	3,60	3,60

Dan table diatas terdapat perbedaan dari Tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya Penambahan Indikator yang di Perjanjikan antara Kepala Perangkat Daerah dan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021 dengan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2016-2021;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

❖ Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara , Nomor : Itda-700/115/LHE-SAKIP/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dimana hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Koperasi dan Usaba KecilMenengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2020 memperoleh nilai sebesar 71,40 (tujuh puluh satu koma empat puluh) atau dengan ***predikat penilaian BB ' (Sangat Baik).*** Penilaian tersebut menunjukan Akuntabilitas Kinerja sangat baik memiliki sistem yang dapat digunakan unhrk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yaag berorientasi pada hasil di Organisasi Perangkat Daerah masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

No	Komponen Yang Dinilai	HASI PENILAIAN EVALUASI AKIP			
		Bobot (%)	Nilai Tahun 2019	Nilai Tahun 2020	Peningkatan/ penurunan capaian
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,87	26,57	Meningkat
2	Pengukuran Kinerja	25,00	13,75	14,69	Meningkat
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,04	12,39	Meningkat
4	Evaluasi Internal	10,00	1,13	1,50	Meningkat
5	Pencapaian Kinerja Sasaran Organisasi	20,00	14,38	16,25	Meningkat
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	**100,00**	**66,17**	**71,40**	Meningkat
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**BB**	

A. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabuoaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} x100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} x100\%$$

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 sebesar 100 %. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%	Kriteria Penilaian
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	81,53	82	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Presentase UMK Naik Kelas	%	3,24	3,24	100	Sangat Tinggi
		Rata-Rata				100	

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Persentase Koperasi Aktif

Target kinerja “Persentase Koperasi Aktif” tahun 2021 sebesar 81,53 % dan realisasinya 82% atau capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat “ Sangat Tinggi”

Adapun Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi tersebut dicapai melalui Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI;
2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN;

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp 180.755.000.- dari anggaran sebesar Rp 249.999.800,-. atau 72,30% dari total anggaran. Realisasi kinerja

sebesar 99,5 %, jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Dan bila memperhatikan Tabel diatas, pada tahun 2021 capaian kinerja Persentase Koperasi Aktif yaitu 100 % dimana realisasinya lebih tinggi dari target yang ditetapkan 81,53 % sehingga kriteria penilaian untuk Indikator Persentase Koperasi Aktif adalah Sangat Tinggi , dan ini menunjukan adanya peningkatan bila dilihat dari angka realisasi tahun lalu 82,11 %, dan cendrung menaik bila dibandingkan dengan angka pada tahun 2019 dengan angka 81,85 % dan seterusnya ditahun 2018 dengan angka 81,30%, dari capaian angka-angka tersebut dapat kita lihat penjelasan pada table berikut :

Tabel 3.5

Persentasi Koperasi Aktif Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara

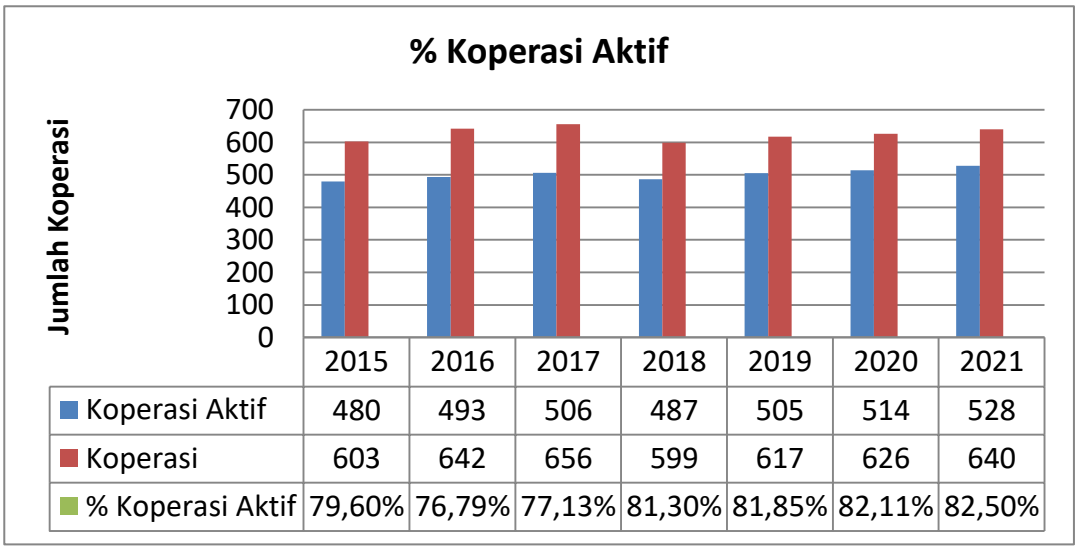

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Koperasi Aktif	480	493	506	487	505	514	528
Koperasi	603	642	656	599	617	626	640
% Koperasi Aktif	79,60%	76,79%	77,13%	81,30%	81,85%	82,11%	82,50%

Pada table diatas kita ketahui bahwa Tolak ukur sasaran ***Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi*** diukur dengan dua indicator yaitu Indikator Koperasi Aktif yang dibandingkan dengan Jumlah Koperasi seluruhnya. Dimana Koperasi Aktif pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan dengan angka 640 Koperasi Aktif jika dibandingkatan dengan capaian tahun lalu 2020 dengan angka 626 Koperasi Aktif, dan ditahun 2019 dengan angka 617 Koperasi Aktif maka Koperasi Aktif mengalami peningkatan, sedangkan Jumlah Koperasi seluruhnya mengalami trend peningkatan pula di tahun 2021 dimana jumlah Koperasi sebanyak 640 ;

Tabel 3.6

Sebaran Koperasi Aktif Kabupaten Kutai Kartanegara :

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI	AKTIF	TDK AKTIF	BEKU	RAT
1	TABANG	25	24	1	-	4
2	KEMBANG JANGGUT	33	33	-	-	18
3	KENOHAN	15	14	1	-	3
4	MUARA WIS	6	5	1	-	2
5	KOTA BANGUN	24	23	1	-	6
6	MUARA KAMAN	48	44	4	-	11
7	MUARA MUNTAI	21	19	2	1	2
8	SEBULU	41	34	7	-	4
9	TENGGARONG	129	107	22	-	8
10	TENGGARONG SEBERANG	34	27	6	-	7
11	LOA KULU	45	40	5	-	7
12	LOA JANAN	35	26	9	-	3
13	SANGA SANGA	29	14	15	-	2
14	MUARA JAWA	30	24	6	-	5
15	SAMBOJA	51	40	11	-	7
16	ANGGANA	21	17	4	-	4
17	MUARA BADAK	32	24	8	-	4
18	MARANGKAYU	21	12	9	-	2
JUMLAH		**640**	**528**	**112**	**1**	**99**

Faktor Pendorong :

Faktor pendorong atau penyebab keberhasilan tersebut diantaranya :

1. Adanya Kegiatan pendampingan dan Memonitoring Rapat Anggota Tahunan Koperasi ketaatan Koperasi dalam melaksanakan kewajibannya salahsatunya Rapat Anggota Tahunan (RAT), Sebagaimana dengan Permenkop Nomor 25 tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi pada pasal 1 angka 3 bahwa **Koperasi Aktif** adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

DOKUMENTASI RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)
TAHUN 2021

2. Adanya Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi di Kab. Kutai Kartanegara

3. Melaksanakan Pelatihan bagi Pengurus/pengelola Koperasi yang bertujuan Meningkatkan Pengetahuan Pengurus/Pengelola Koperasi dalam mengelola Koperasi sesuai dengan praktek Bisnis yang sehat, Meningkatkan Pengetahuan Pengurus/ Pengelola Koperasi agar dapat menjalankan usaha kopersi dengan baik;

Dokumentasi Kegiatan Pelatihan bagi Pengurus/pengelola
Koperasi di Kab. Kutai Kartanegara

Faktor Penghambat :

1. Pandemi Covid-19 mengakibatkan pembatasan aktivitas secara masif, yang berujung pada penurunan gerak perekonomian, termasuk sektor koperasi, dan berdasarkan survey, laporan yang masuk pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai

Kartanegara sebagai besar dampaknya Penundaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menjadi kewajiban koperasi, Penurunan Aktifitas Usaha Koperasi;

2. Persoalan internal Koperasi yaitu soal komitmen para anggota untuk saling memiliki koperasi, dimana dalam berkoperasi masih ada pemahaman para anggota sekadar memanfaatkan simpan-menyimpan, akan tetapi tak pernah meminjam untuk kegiatan usaha. Ini yang dinamakan tak punya rasa komitmen dalam berkoperasi, .

Tindak Lanjut / Solusi :

1. Memberikan petunjuk dan pendampingan dimasa Pandemi Covid-19 tentang Kewajiban Koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk terus memberikan pemahaman kepada Koperasi bahwa persoalan komitmen berkoperasi menjadi pemikiran bersama karena sejatinya keberadaan koperasi bukan untuk kepentingan pengurus dan pengelola saja, tapi kebersamaan dan berorientasi pada kesejahteraan para anggota;

Tabel 3.7
Analis Capaian Kinerja
Sasaran 2 : Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Tahun Lalu 2017	Capaian Tahun Lalu 2018	Capaian Tahun Lalu 2019	Capaian Tahun Lalu 2020
Presentase Usaha Mikro Naik Kelas	**3.60%**	**3.48 %**	**2.89 %**	**2.84 %**	**2,97 %**	**3.23 %**

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro dengan Indikator Presentase Usaha Mikro Naik Kelas mendapatkan angka capaian sebesar 3,48 % dari target 3.60 % atau tingkat capaian sebesar 96.66 % ‘Sangat Tinggi’.

Sasaran Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro tersebut dicapai melalui Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM);
2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM;

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp 492,454,235,- dari anggaran sebesar Rp, 963,920,800,- atau 51,09% dari total anggaran. Realisasi kinerja sebesar 60,3

%, jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Dapat di jelaskan pula dari tabel diatas, pada tahun 2021 capaian kinerja UMKM Naik Kelas yaitu 3,48 % dimana realisasinya tidak sesuai dengan target yang diharapkan sebesar 3,60 % atau capaian 96,66 % sehingga kriteria penilaian untuk Indikator Persentase Usaha Mikro Naik Kelas adalah Tinggi , dan ini menunjukan adanya penurunan bila dilihat dari angka realisasi tahun lalu 3,23 %., dari capaian angka-angka tersebut dapat kita lihat penjelasan pada table berikut :

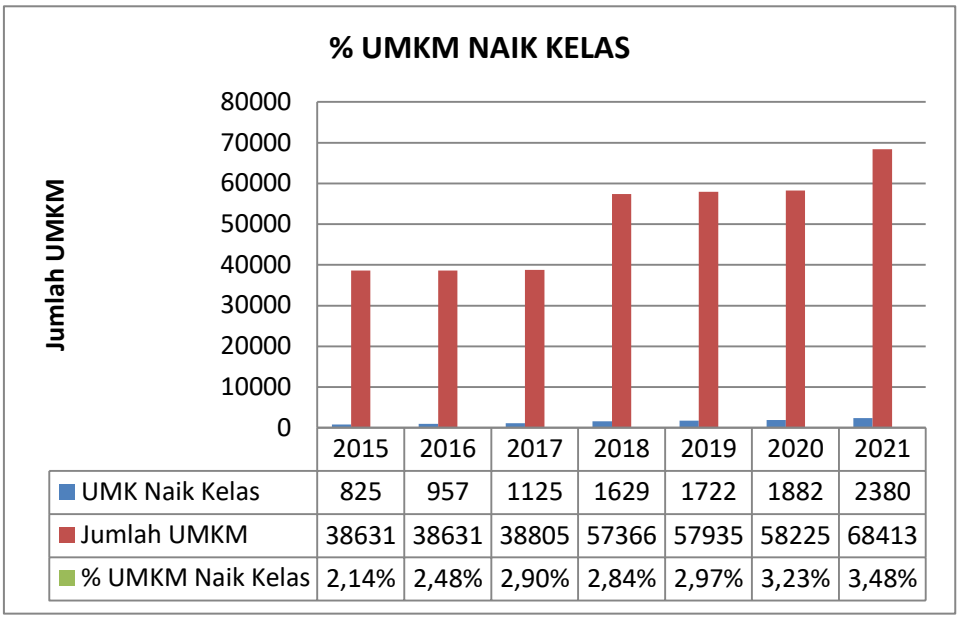

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
UMK Naik Kelas	825	957	1125	1629	1722	1882	2380
Jumlah UMKM	38631	38631	38805	57366	57935	58225	68413
% UMKM Naik Kelas	2,14%	2,48%	2,90%	2,84%	2,97%	3,23%	3,48%

TAHUN	UMK		WUB	NAIK KELAS	JUMLAH
	MIKRO	KECIL			
2015	37,806	825	0	0	38,631
2016	37,674	957	0	132	38,631
2017	37,680	1,125	174	168	38,805
2018	55,737	1,629	18561	504	57,366
2019	56,213	1,722	569	93	57,935
2020	56,343	1,882	290	160	58,225
2021	66,033	2,380	10188	498	68,413

Pada table diatas kita ketahui bahwa Tolak ukur sasaran ***Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro*** diukur dengan dua indicator yaitu Indikator Usaha Mikro yang Naik Kelas dibandingkan dengan Jumlah UMKM seluruhnya. Dimana untuk Usaha Mikro Naik Kelas pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan dengan angka 498 UMK Naik Kelas jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu 2020 dengan angka 160 pelaku usaha maka ada peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2019 dengan jumlah 93 pelaku usaha, sedangkan

Jumlah UMKM seluruhnya mengalami trend peningkatan tahun 2021 jumlah UMKM sebanyak 64.413 hal ini disebabkan adanya penambahan Wirausaha Baru dan jika dibandingkan degan tahun lalu 2020 dengan angka 58.225 UMKM, dan ditahun 2019 dengan angka 57.935 UMKM maka ada peningkatan Jumlah UMKM ;

Faktor Pendorong :

Faktor pendukung atau penyebab keberhasilan tersebut diantaranya :

1. Kegiatan Pendampingan Penerbitan IUMK (Ijin Usaha Mikro dan Kecil) yang tujuannya adalah kepada setiap pelaku usaha perseorangan bisa mendapatkan legalitas usaha. Dengan memiliki IUMK berarti pelaku usaha mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan, serta mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan. Dengan memiliki IUMK para pelaku usaha diharapkan dapat melakukan pengembangan usahanya sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi pelaku usaha yang naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah;

Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

2. Kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro

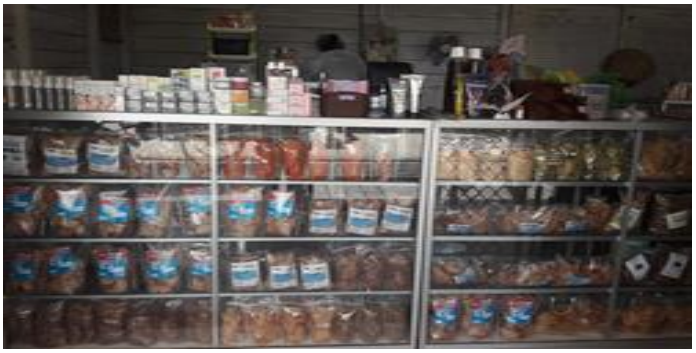

Dokumentasi kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro

3. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro;

Dokumentasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 82% . Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya tahun 2020 sebesar 82,11% Terjadi peningkatan kinerja sebesar 0,11%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Presentase Koperasi Aktif	Persentase	81,43	82,11	100,83	81,53	82,50	101,19	Meningkat
Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Presentase Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase	3,28	3,23	98,55	3,60	3,48	96.66	Meningkat

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2021)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021
Persentase Koperasi Aktif	81,53%	82%	100%
Presentase UMK Naik Kelas	3,60%	3,48 %	96,66%

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realiasai Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatnya Kualitas Koperasi	**Persentase Koperasi Aktif**	**100 %**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**97.20 %**	**3**	**Terjadi Efisiensi**
		99 %	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**55.70 %**	**43,30**	**Terjadi Efisiensi**

Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	**Presentase Usaha Mikro Naik Kelas**	**96,66 %**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**60.30 %**	**36,36**	**Terjadi Efisiensi**
		0 %	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**0 %**	**0 %**	**-**

Untuk program pengawasan dan pemeriksaan koperasi realisasi anggaran tercapai 97,20 % dan capaian kinerja sebesar 100 % sehingga terjadi efisiensi sebesar 3 %. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian capaian kinerja nya sebesar 99 % dan capaian realisasi anggaran sebesar 55,70 % sehingga tercapailah efisiensi sebesar 43,30 %. Dan untuk indicator kinerja sasaran presentase usaha mikro naik kelas yang mana programnya terdiri dari program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) tercapai realisasi kinerja sebesar 96,66 % dan capaian realisasi anggarannya sebesar 60.30 % sehingga tercapai tingkat efisiensi sebesar 36.36 %.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

   Indikator kinerja Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi tahun 2021 yaitu Koperasi Melaksanakan RAT dan cakupan bina Koperasi dengan target sebesar 81,53 % dan realisasinya 97,20% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

   Indikator kinerja Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian tahun 2021 yaitu persentase koperasi aktif dengan target sebesar 31,50 % dan realisasinya 55,70 % atau capaian kinerja sebesar 99.00 %.Target kinerja tercapai.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

   Indikator kinerja Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) tahun 2021 yaitu pertumbuhan UMKM wirausaha baru dengan target 90 orang dan capaian kinerjanya sebesar 90 orang dan persentase usaha

mikro yang naik kelas dengan target sebesar 4% dan capaian kinerja 4% sehingga realisasi program ini sebesar 60, 30 %. Target kinerja tercapai.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Presentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	81,53 %	97,20 %	100 %	Berhasil
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Presentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	31,50 %	55,70 %	99 %	Berhasil
Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Presentase Usaha Mikro Naik Kelas	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	90 Orang, dan 4 %	60,30 %	100 %	Berhasil

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 80,32 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM	*Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA***	12.218.561.897,00	10.131.566.365,00	82,92	2.086.995.532,00
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.327.832.737,00	7.730.970.750,00	82,88	1.596.861.987,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.223.391.737,00	7.641.649.750,00	83%	1.581.741.987,00
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	104.441.000,00	89.321.000,00	86%	15.120.000,00
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.999.800,00	213.343.297,00	62,75	126.656.503,00
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000,00	130.095.197,00	87%	19.904.803,00
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	189.999.800,00	83.248.100,00	44%	106.751.700,00
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	93.926.000,00	79.640.000,00	84,79	14.286.000,00
		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	93.926.000,00	79.640.000,00	85%	14.286.000,00
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	11.680.000,00	11,68	88.320.000,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	0,00	0%	50.000.000,00
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	11.680.000,00	23%	38.320.000,00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	704.196.300,00	585.138.446,00	83,09	119.057.854,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000,00	68.605.000,00	98%	1.395.000,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	27.917.100,00	56%	22.082.900,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.999.800,00	48.088.000,00	96%	1.911.800,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.064.000,00	184.144.146,00	74%	65.919.854,00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	89.683.000,00	68.616.200,00	77%	21.066.800,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	194.449.500,00	187.768.000,00	97%	6.681.500,00
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256.729.400,00	236.818.600,00	92,24	19.910.800,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	256.729.400,00	236.818.600,00	92%	19.910.800,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	915.155.800,00	815.435.864,00	89,10	99.719.936,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.199.000,00	1.199.000,00	100%	0,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.517.640,00	128.539.729,00	83%	25.977.911,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	759.439.160,00	685.697.135,00	90%	73.742.025,00
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.721.860,00	458.539.408,00	95,39	22.182.452,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.700.000,00	163.256.508,00	90%	17.443.492,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.850.000,00	14.761.000,00	99%	89.000,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	285.171.860,00	280.521.900,00	98%	4.649.960,00
Meningkatnya Kualitas Koperasi	***Presentase Koperasi Aktif***	***PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM***	83.786.250,00	51.116.700,00	61%	32.669.550,00
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	83.786.250,00	51.116.700,00	61%	32.669.550,00
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	83.786.250,00	51.116.700,00	61%	32.669.550,00
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Presentase Koperasi Aktif	***PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI***	100.000.000,00	97.150.000,00	97%	2.850.000,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000,00	97.150.000,00	97%	2.850.000,00
		Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	97.150.000,00	97%	2.850.000,00
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Presentase Koperasi Aktif	***PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN***	149.999.800,00	83.605.000,00	56%	66.394.800,00
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.999.800,00	83.605.000,00	56%	66.394.800,00
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	149.999.800,00	83.605.000,00	56%	66.394.800,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha	***Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru***	***PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)***	817.020.000,00	492.454.235,00	60,27	308.101.400,00
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	817.020.000,00	492.454.235,00	60,27	308.101.400,00
		Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	200.000.000,00	183.535.635,00	92%	16.464.365,00
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	190.000.000,00	119.825.000,00	63%	70.175.000,00
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	427.020.000,00	189.093.600,00	44%	237.926.400,00
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha	Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru	***PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM***	146.900.800,00	0,00	0%	146.900.800,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	146.900.800,00	0,00	0%	146.900.800,00
		Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	146.900.800,00	0,00	0%	146.900.800,00
Total			**13.516.268.747,00**	**10.855.892.300,00**	**80,32%**	**2.577.517.282,00**

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2020) realisasi anggaran sebesar 77,01 %, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2020)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Koperasi dan UKM	Predikat Akuntabilitas Kinerja koperasi dan UKM	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1,804,268,197.00	1,537,813,894.00	85.23%	266,454,303.00
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133,278,695.00	121,116,508.00	91%	12,162,187.00
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13,650,000.00	6,363,430.00	47%	7,286,570.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	140,000,000.00	139,847,620.00	100%	152,380.00
		Penyediaan alat tulis kantor	70,000,000.00	69,712,500.00	100%	287,500.00
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50,000,000.00	45,713,000.00	91%	4,287,000.00
		Penyediaan bahan logistik kantor	20,000,000.00	19,783,650.00	99%	216,350.00
		Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000.00	30,440,000.00	76%	9,560,000.00
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	359,080,000.00	301,271,125.00	84%	57,808,875.00
		Penyediaan jasa surat menyurat	1,200,000.00	1,200,000.00	100%	-
		Penataan Arsip Perangkat Daerah	250,000,000.00	233,795,490.00	94%	16,204,510.00
		Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	727,059,502.00	568,570,571.00	78%	158,488,931.00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	620,211,651.00	510,407,190.00	82.30%	109,804,461.00
		Pengadaan peralatan gedung	120,263,800.00	108,417,000.00	90%	11,846,800.00
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	125,000,000.00	121,456,820.00	97%	3,543,180.00
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	118,800,000.00	81,545,000.00	69%	37,255,000.00
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	70,000,000.00	26,932,500.00	38%	43,067,500.00
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	186,147,851.00	172,055,870.00	92%	14,091,981.00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000.00	62,987,080.00	62.99%	37,012,920.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	50,000,000.00	22,764,080.00	46%	27,235,920.00
		Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	50,000,000.00	40,223,000.00	80%	9,777,000.00
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	605,601,200.00	469,427,563.00	77.51%	136,173,637.00
		Publikasi Perencanaan Pembangunan	78,518,200.00	78,518,200.00	100%	-
		Pengembangan dan Pengelolaan Website	30,000,000.00	10,304,700.00	34%	19,695,300.00
		Inventarisasi Asset Perangkat Daerah	21,783,000.00	10,182,000.00	47%	11,601,000.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev	190,000,000.00	121,365,263.00	64%	68,634,737.00
		Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	191,373,800.00	169,493,200.00	89%	21,880,600.00
		Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	93,926,200.00	79,564,200.00	85%	14,362,000.00
Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	452,810,000.00	311,564,750.00	68.81%	141,245,250.00
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan UMK	85,000,000.00	30,802,700.00	36%	54,197,300.00
		Pendataan UMK Tani dan Nelayan	67,810,000.00	66,640,000.00	98%	1,170,000.00
		Penyusunan Komoditi UMKM Unggulan	150,000,000.00	145,608,800.00	97%	4,391,200.00
		Pendampingan Penerbitan IUMK	150,000,000.00	68,513,250.00	46%	81,486,750.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Implementasi Kerjasama Koperasi	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	890,000,000.00	494,820,000.00	55.60%	395,180,000.00
		Fasilitasi Kerjasama Penguatan Kapasitas Usaha Koperasi	115,000,000.00	88,961,000.00	77%	26,039,000.00
		Fasilitasi Kerjasama Permodalan Koperasi dengan Lembaga Permodalan	115,000,000.00	67,701,000.00	59%	47,299,000.00
		Fasilitasi LPD menjadi KSP/USP-koperasi	485,000,000.00	183,243,000.00	38%	301,757,000.00
		Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir	75,000,000.00	55,531,000.00	74%	19,469,000.00
		Pengembangan Usaha Koperasi	100,000,000.00	99,384,000.00	99%	616,000.00
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	740,000,000.00	701,410,917.00	94.79%	38,589,083.00
		Pendampingan dan monev RAT Koperasi	225,000,000.00	224,450,500.00	100%	549,500.00
		Fasilitasi Pembubaran Koperasi	90,000,000.00	82,874,800.00	92%	7,125,200.00
		Pengawasan dan Penilaian Koperasi	150,000,000.00	147,052,767.00	98%	2,947,233.00
		Pelatihan Pengurus Koperasi	50,000,000.00	42,101,000.00	84%	7,899,000.00
		Fasilitasi Pengembangan Koperasi Petani Jagung	75,000,000.00	74,549,850.00	99%	450,150.00
		Sosialisasi Pemahaman Koperasi	150,000,000.00	130,382,000.00	87%	19,618,000.00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya UMKM Wira Usaha Baru	Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru	**Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif**	350,000,000.00	195,486,400.00	55.85%	154,513,600.00
		Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Miskin usia produktif	150,000,000.00	109,870,400.00	73%	40,129,600.00
		Pendataan Wirausaha Baru	200,000,000.00	85,616,000.00	43%	114,384,000.00
Total			**5,562,891,048.00**	**4,283,917,794.00**	**77.01%**	**1,278,973,254.00**

Dengan demikian, pada tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 3,31%

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021 Capaian Kinerja sebesar 90.1 % dan Capaian anggaran sebesar 80.3% (Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah), dengan rincian sebagai berikut :

1) Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah sebesar 96% (Sangat tinggi) dan capaian anggaran 82.9% (Tinggi).
2) Capaian kinerja Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam sebesar 100% (Sangat tinggi) dan capaian anggaran 61% (Sedang)
3) Capaian kinerja Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar 100% (Sangat tinggi) dan capaian anggaran 97,2% (Sangat tinggi)
4) Capaian kinerja Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar 99% (Sangat tinggi) dan capaian anggaran sebesar 55,7%
5) Capaian kinerja Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar 85,5% dan capaian anggaran 60,3%

Pada tahun 2021 capaian kinerja Persentase Koperasi Aktif yaitu 100 % dimana realisasinya lebih tinggi dari target yang ditetapkan 81,53 % sehingga kriteria penilaian untuk Indikator Persentase Koperasi Aktif adalah Sangat Tinggi , dan ini menunjukan adanya peningkatan bila dilihat dari angka realisasi tahun lalu (2020) 82,11 %

pada tahun 2021 capaian kinerja UMKM Naik Kelas yaitu 3,48 % dimana realisasinya tidak sesuai dengan target yang diharapkan sebesar 3,60 % atau capaian 96,66 % sehingga kriteria penilaian untuk Indikator Persentase Usaha Mikro Naik Kelas adalah Tinggi , dan ini menunjukan adanya penurunan bila dilihat dari angka realisasi tahun lalu (2019) 3,23 %

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2021, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

1) Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/ kota, akan dimonitoring dan dievaluasi pada tahun 2022 ;
2) Melakukan diklat teknis akuntansi koperasi untuk pengelola koperasi dan pengawas agar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akuntansi koperasi ;
3) Agar anggaran kas kegiatan sub kegiatan dimulai awal triwulan agar target target yang direncanakan segera dapat dilaksanakan dan sesuai target yang diharapkan;

4) Bagi pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) kiranya dapat segera mengikuti program – program guna pengembangan usaha yang dimilikinya baik itu dalam hal permodalan, serta Pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan di tahun 2022;
5) Guna pencapaian target yang lebih luas dan lebih banyak, agar diberikan penambahan anggaran kegiatan sub kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

.

Kutai Kartanegara, Februari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Drs. H. Tajuddin

NIP. 19640405 198603 1 036